

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMALANREA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Hasran¹, Zaenal Akhmad², Rahman³

¹Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email: doktorhasan@gmail.com

²Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email: zaenalakhmad64@gmail.com

³ Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email: doktorrahman12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kuantitatif deskriptif, Dasar penelitian ini adalah metode survey. Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu yang menjadi objek penelitian adalah Pengurus LPM di Kecamatan Tamalanrea, pemerintahan kelurahan dan masyarakat di Kecamatan Tamalanrea. Penulis menggunakan teknik penarikan sampel secara purposive. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti akan digunakan : Data Primer dan Data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kuisioner, Observasi, Study kepustakaan dan Dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka dalam penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari kuisioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil Penelitian, didapatkan Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, akurasi data dan informasi, sarana dan prasarana, koordinasi dan motivasi.

Kata kunci: Pemberdayaan; Perencanaan; Pembangunan

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempengaruhi pembangunan nasional saat ini adalah perubahan paradigma pemerintahan dari *government* ke *governance* yang membawa implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pola pelayanan publik. Jika selama ini pemerintah yang banyak mengambil prakarsa dalam urusan pelayanan publik dan pemerintahan, maka dengan pola baru ini prakarsa itu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Dalam konsep *governance*, peran pemerintah yang tadinya menjadi aktor utama dalam pembangunan dan penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Hal tersebut juga termuat dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu, perlu diadakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk bekerja sama. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pendidikan. Masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan kerja baru untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat yang diadakan Badan Pemberdayaan Masyarakat disimpulkan bahwa masyarakat tidak akan mau berpartisipasi di dalam program pembangunan masyarakat, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka. Pemerintah daerah melalui aparatnya dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur pentingnya dalam *governance* maka untuk mendorong terciptanya *good governance*, organisasi masyarakat selayaknya memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan *good governance*. Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang dialami organisasi masyarakat menuju partisipasi yang baik dalam program pembangunan, seperti masyarakat yang kurang inisiatif, kurang terorganisir, dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi. Dengan demikian, strategi penguatan institusi lokal merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan warga berpartisipasi dalam pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata.
4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Kepala Bidang Ketahanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Makassar dewasa ini cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pemerintah telah banyak berperan didalam merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan Kota Makassar, namun tetap dirasakan belum optimal karena dukungan lembaga masyarakat yang rendah. Dengan demikian, peningkatan peran lembaga masyarakat menjadi penting untuk dikaji.

KAJIAN TEORI

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan membutuhkan perpaduan keahlian antara aparat perencana yang berkualitas dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta berada dalam tatanan sistem. Berikut akan dikemukakan beberapa faktor yang memengaruhi kinerja LPM.

Profesionalisme Aparat Perencana

Seperti halnya pada setiap aktifitas kegiatan baik yang dilaksanakan oleh individu maupun organisasi, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai motor penggerak. Begitu pula halnya dalam perencanaan pembangunan daerah, perencana selaku SDM perencanaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan.

Perumus rencana dalam pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan adalah pengurus LPM difasilitasi oleh pihak kelurahan/kecamatan dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Aparat perencana yang dibutuhkan ialah aparat yang tahu apa yang ia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Termasuk mempersiapkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan agar realisasi terhadap rencana itu dilakukan dengan baik, dengan perkataan lain aparat yang dapat menghasilkan rencana yang lebih baik, lebih cepat prosesnya dan sesuai dengan standar, yang kesemuannya mendatangkan kepuasan pada semua pihak yang terkait. Pertanyaan yang kemudian timbul bagaimana menciptakan profesionalisme aparat perencana?

Menurut Pamudji, profesionalisme suatu Negara dapat ditinjau dari dua konteks yaitu “konteks makro berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan konterks mikro

berkaitan dengan pengembangan karir dimana kedua konteks ini saling mengisi”. Profesionalisme aparat perencana yang di dalam terdapat jabatan karir memerlukan kecakapan, keterampilan dan pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugasnya terutama dalam perencanaan pembangunan. Jadi, orang dikatakan profesionalisme ketika mempunyai keahlian dan keterampilan baik keterampilan teknis yang disertai dengan pengetahuan teknis dari pekerjaannya sendiri maupun keterampilan manajemen yang membantunya dalam menganalisa secara kuantitatif dan kualitatif mengenai masalah-masalah yang dihadapi organisasi .

Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki aparat perencana termasuk penguasaannya terhadap iptek (dapat mengoperasikan sarana teknologi yang ada), kedisiplinan atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan sistem, nilai kode etik/prinsip-prinsip berusaha yang ditetapkan organisasi dapat membantunya menjadi aparat profesional yang memiliki kreativitas atau kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menyusun perencanaan pembangunan yang realistis untuk dicapai dan dapat memberi hasil yang memuaskan. Selain itu dapat bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan yang didalam maupun diluar pekerjaan sehingga dapat diciptakan rencana komprehensif. Rencana dan program yang dituangkan dalam bentuk konsep merupakan tolak ukur kemampuan seorang perencana, sejauh mana cakrawala pemikirannya dan sejauh mana kelayakannya untuk mengoperasikan.

Ringkasnya, secara teoritis telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang multidimensional dibutuhkan kinerja atau kemampuan kerja yang tinggi dari pengurus LPM. Untuk itu aparat perencana perlu meningkatkan kemampuan atau keterampilan kerja melalui peningkatan kemampuan keterampilan atau perubahan sikap ke arah yang lebih mandiri dan profesional. Profesionalisme sangat dibutuhkan oleh aparat karena betapa tingginya kemampuan intelektual seseorang, pintarnya serta tingginya dedikasi terhadap tugas, namun yang terpenting juga profesionalisme.

Data dan Informasi

Sebelum membahas data dan informasi lebih lanjut, berikut dikemukakan pengertian data dan informasi. Informasi adalah: 1) Penerangan, misalnya information section (bagian penerangan); 2) Keterangan, misalnya berita atau keterangan yang diperoleh itu kemudian dipergunakan untuk mengecek keadaan sesungguhnya. Informasi lazim disingkat dengan perkataan info; 3) Fakta atau gagasan ide yang diperoleh karena melakukan sesuatu misalnya karena membaca, komunikasi langsung, survey. Fakta adalah suatu kenyataan yang terjadi.

Sedangkan data atau bahan keterangan adalah himpunan kenyataan-kenyataan yang mengandung suatu keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat sesuatu keputusan atau menyusun kesimpulan-kesimpulan. Data dan informasi yang dibutuhkan adalah yang komprehensif

dan lengkap, informasi yang akurat atau informasi yang dapat dipercaya, baik dilihat dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut berasal dari dalam lingkungan organisasi, yang kemudian digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan akan berlangsung lebih lancar apabila terdapat informasi yang lebih akurat serta dapat dipercaya dari berbagai segi kehidupan masyarakat, baik jumlah, jenis maupun mutunya. Selain itu informasi yang tepat waktu dimana dalam kegiatan pengumpulan, analisa dan pengolahan informasi harus berlangsung terus menerus yang mengharuskan selalu terjadi dialog yang efektif antara pihak yang menangani informasi dengan para perencana pembangunan. Dengan demikian apa yang dibutuhkan aparat perencana, kapan dan dimana akan dapat dipenuhi para spesialis informasi yang tugasnya memang menyediakan informasi tepat waktu. Dengan komunikasi yang efektif, penyajian serta penyimpanan informasi menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis nilai operasionalnya tinggi, sehingga informasi terolah secara matang.

Data dan informasi diperlukan untuk mengetahui berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sehingga program yang akan ditetapkan nantinya akan mendukung perkembangan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memungkinkan aparat perencana bertindak rasional, ilmiah dan realistis, baginya mutlak perlu tersedia berbagai jenis informasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti sumber data, kegunaan dan penggunaannya dalam perencanaan pembangunan dimana serangkaian informasi tentang suatu bidang pembangunan mempunyai kegunaan untuk bidang pembangunan lain.

Sarana dan Teknologi

Sebagaimana kita ketahui, perencanaan pembangunan merupakan proses awal dari proses pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah tertentu. Sebagai proses awal perencanaan pembangunan daerah harus dipersiapkan secara matang dan benar-benar akurat sehingga akan memudahkan pelaksanaan proses-proses pembangunan berikutnya. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah senantiasa harus mengikuti perkembangan yang ada, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun perkembangan teknologi.

Mengenai pentingnya memperhatikan perkembangan teknologi dalam proses pembangunan ini, Bintoro (1988: 67) mengatakan "ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan". Dalam proses perumusan kebijaksanaan termasuk proses perencanaan. Dalam hal ini penggunaan teknologi dalam perencanaan pembangunan tidak dapat dilihat dari segi peralatan yang digunakan saja, tetapi juga berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang maju. Peralatan hanya merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan ini juga dikemukakan oleh lembaga dunia (PBB) yang menyatakan:

“Developing countries need to give more attention to management of scientific and technological institutions as well as to applications of science and technology to public administration”

Implementasi Teknologi dalam perencanaan pembangunan tidak dapat disamakan atau diseragamkan. Artinya hal itu bergantung pada hal apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu digunakan. Letak dan kondisi geografis juga sangat menentukan penggunaan metode, teknik dan perlengkapan perencanaan. Namun yang terpenting dari semua ini adalah sampai sejauh mana sumber daya manusia perencananya mampu mengimprovisasi perkembangan tersebut secara optimal.

Dengan melihat dari sudut manajemen strategik. Sondang P Siagian (1995: 81) menyatakan:

“...jika orientasi para pengambil keputusan strategik semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional. Akan tetapi kiranya para pengambil keputusan strategik itu harus menyadari pula bahwa dengan perkembangan teknologi yang secanggih apapun, orientasi manusia tetap menjadi sangat penting karena dengan kehadiran dan pemanfaatan teknologi yang paling canggih pun unsur manusia yang paling penting”.

Jadi, dalam hal ini LPM dituntut untuk memilih secara tepat sarana dan teknologi yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk memeriksa kondisi dan kelayakan operasi serta kemepuan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki (bangunan, tata letak) untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi apa saja perbaikan dan penyempurnaan yang harus dilakukan, agar kemampuannya kembali ke kondisi semula.

Koordinasi

Seerti diketahui bersama, pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai pihak, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai variasi fungsi dan peranan. Variasi fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah di perlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan dalam proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponen-komponen yang berbeda tersebut.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam pelaksanaanya koordinasi hendaknya dilakukann dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi merupakan keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Motivasi Kerja

Dalam Ensiklopedi Administrasi, dikemukakan bahwa motivasi adalah dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota dalam menanggapi sesuatu peristiwa dalam

masyarakat. Motivasi ini dapat berupa motivasi pribadi dan adapula motivasi kelompok. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi orang, khususnya tiap pengurus LPM dalam penelitian ini adalah berbeda karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu dalam bentuk keinginan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya, kebutuhan akan imbalan, dan kegairahan untuk berprestasi tinggi.

Lebih lanjut Ibnu Syamsi dalam bukunya Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen mengemukakan bahwa orang bekerja itu mempunyai beberapa motivasi yaitu:

1. Kepastian adalah masa depan yang pasti melalui kelangsungan kerja.
2. Kesempatan adalah misalnya kesempatan untuk naik pangkatnya atau di promosikan
3. Peran serta adalah bawahan berperan serta dalam rangka pembuatan keputusan, melalui saran-saran atau masukan-masukannya.
4. Pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerjanya
5. Ekonomi adalah berupa upah atau gaji yang layak untuk hidup sekeluarga
6. Pencapaian adalah yakni merasa berhasil dalam pekerjaan.
7. komunikasi adalah langkah senangnya apabila karyawan itu mengetahui apa saja yang terjadi dalam instansi.
8. Kekuasaan yakni memiliki kewibawaan, dan dapat mempengaruhi orang lain.
9. Keterpaduan adalah yakni merasa dirinya merupakan bagian dari organisasi secara keseluruhan.
10. Kebebasan adalah kebebasan pribadi dan kebebasan berpendapat.

Untuk itu perlu diciptakan motivasi yang searah untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka kelangsungan usaha dan mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga apa yang menjadi kehendak dan cita-cita pengurus LPM dan LPM itu sendiri dapat diwujudkan. Ringkasnya motivasi kerja melatarbelakangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, khususnya dalam membuat perencanaan yang benar-benar dibutuhkan.

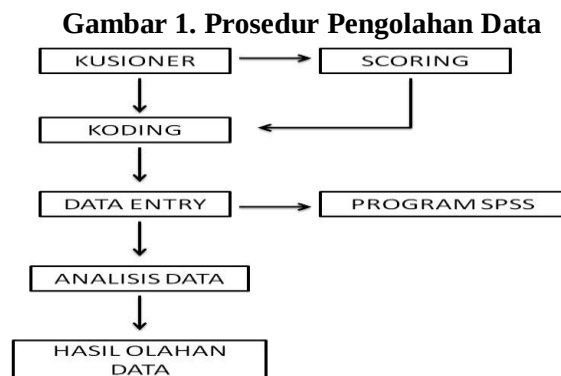
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Tamalanrea sebagai kecamatan yang memiliki kompleksitas permasalahan terutama yang menyangkut mengenai perencanaan pembangunan sehingga dipandang perlu untuk diteliti. Penelitian ini berpusat pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai unit kerja penanggung jawab perencanaan pembangunan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kuantitatif deskriptif, dasar penelitian ini adalah metode survey. Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu yang menjadi objek penelitian adalah Pengurus LPM di Kecamatan Tamalanrea, pemerintahan kelurahan dan masyarakat di Kecamatan Tamalanrea. Penulis menggunakan teknik

penarikan sampel secara purposive. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti akan digunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi, study kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka dalam penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari kuisioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS.

Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang di teliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Prosedur pengolahan data dimulai dengan pembuatan kuisioner, menentukan variabel, dimensi, dan indikator-indikator. Setelah itu dilakukan skoring terhadap pilihan jawaban.



Berikut skoring terhadap kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhinya:

Tabel 1 Rentang Penafsiran Kinerja

Rentang	Penafsiran
1,00 – 1,75	Tidak baik
1,76 – 2,50	Cukup baik
2,51 – 3,25	Baik
3,26 – 4,00	Sangat baik

Tabel 2 Tabel Rentang Penafsiran Faktor pendukung dan penghambat

Rentang	Penafsiran
1,00 – 2,50	Penghambat
2,51 – 4,00	Pendukung

Berdasarkan dua tabel tersebut dapat diketahui bahwa penentuan penafsiran berdasarkan hasil rata-rata setiap dimensi. Untuk penilaian kinerja digunakan empat kriteria penilaian yaitu: sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik sedangkan untuk faktor-faktor yang memengaruhinya digunakan dua kriteria penilaian yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Selanjutnya yaitu melakukan pengkodean kuisioner (masyarakat, kelurahan, dan pengurus LPM) sebelum proses pengambilan data. Data yang diperoleh dari responden kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel kemudian dianalisis menggunakan regresi linear dengan bantuan

program SPSS versi 16 untuk mengetahui peranan dan faktor-faktor yang memengaruhi peranan LPM Kecamatan Tamalanrea dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar, diantaranya adalah: 1) Profesionalisme pengurus LPM; 2) Data dan informasi yang akurat; 3) Sarana dan prasarana; 4) Koordinasi; 5) Motivasi kerja

Tabel 3
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja LPM

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Profesionalisme	3.3433	.62495	78
Aparat Perencana	3.1233	.46515	78
Data dan Informasi	3.0111	.53417	78
Sarana dan Prasarana	3.1111	.61495	78
Koordinasi	3.5533	.72881	78

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima dimensi yang ada, semua merupakan faktor pendukung kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tamalanrea . Hal ini didasarkan pada skor rata-rata masing-masing dimensi yakni: Profesionalisme sebesar 3,34, data dan informasi 3,12, sarana dan prasaran sebesar 3,01 koordinasi sebesar 3,11, dan motivasi sebesar 3,55 berada pada kategori faktor pendukung (2,51 – 4,00). Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa motivasi mempunyai kontribusi yang paling besar. Berikut penjabaran setiap dimensi yang ada pada variabel faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

1. Profesionalisme Pengurus LPM

Profesionalisme yang dimaksud adalah tingkat pemahaman pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap tugas dan fungsinya dimana tingkat pendidikan dan keahlian menjadi faktor pendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

Tabel 4 Tabel penilaian terhadap profesionalisme pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	20	27,03
3	Baik	48	64,86
4	Sangat baik	6	8,11
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,34

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 4 diketahui bahwa dominan responden menyatakan profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Baik yaitu 48 orang (64,86 %), selanjutnya yang menyatakan

cukup baik sebanyak 20 orang (27,03), sisanya yang menyatakan sangat baik sebanyak 6 orang (8,11). Sehingga jika dilihat rataannya (3,34) dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

2. Data dan Informasi yang Akurat

Data dan informasi yang akurat yang dimaksud yaitu suatu alat yang digunakan untuk pencapaian hasil pembangunan dan sebagai faktor pendukung utama dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 5 Tabel penilaian terhadap akurasi data dan informasi pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak akurat	0	0
2	Cukup akurat	20	25,64
3	Akurat	28	35,80
4	Sangat akurat	30	38,46
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,12

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 5 diketahui bahwa dominan responden menyatakan data dan informasi yang diperoleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat akurat yaitu 30 orang (38,46 %), selanjutnya yang menyatakan akurat sebanyak 28 orang (35,80 %), sisanya 20 orang (25,64) menyatakan cukup akurat. Sehingga jika dilihat rataannya (3,12) dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang diperoleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat akurat.

3. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud sarana dan prasarana yakni alat yang digunakan untuk pencapaian hasil pembangunan dan sebagai faktor pendukung utama dalam membantu kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 6 Tabel penilaian terhadap sarana yang dimiliki LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak memadai	0	0
2	Cukup memadai	16	20,51
3	Memadai	48	61,54
4	Sangat memadai	14	17,95
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,01

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 6 diketahui bahwa dominan responden menyatakan sarana yang ada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memadai yaitu 48 orang (61,54 %), selanjutnya yang menyatakan cukup memadai sebanyak 16 orang (20,51 %), sisanya 14 orang (17,95) menyatakan

sangat memadai. Sehingga jika dilihat rataannya (3,01) dapat disimpulkan bahwa sarana yang ada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat memadai.

4. Koordinasi

Yang dimaksud koordinasi yakni mengomunikasikan berbagai hal berkaitan dengan perencanaan pembangunan antar instansi yang terkait.

Tabel 7
Penilaian terhadap Koordinasi pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	14	17,95
3	Baik	46	58,97
4	Sangat baik	18	23,08
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,11

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Januari 2021

Dari tabel 7 diketahui bahwa dominan responden menyatakan koordinasi antarinstansi yang dilakukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik yaitu 46 orang (58,97 %), selanjutnya yang menyatakan sangat baik sebanyak 18 orang (23,08 %), sisanya 14 orang (17,95) menyatakan cukup baik. Sehingga jika dilihat rataannya (3,11) dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi yang dilakukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

5. Motivasi Kerja

Yang dimaksud motivasi kerja yaitu usaha yang dilakukan oleh atasan untuk memberikan ransangan kepada bawahan sehingga mampu mendorong terciptanya iklim kerja yang baik di lingkungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 8
Tabel penilaian terhadap motivasi kerja pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	24	30,77
3	Baik	41	52,56
4	Sangat baik	13	16,67
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,55

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021.

Dari tabel 8 diketahui bahwa dominan responden menyatakan motivasi kerja yang diberikan kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik yaitu 41 orang (52,56 %), selanjutnya yang menyatakan sangat baik sebanyak 13 orang (16,67 %), sisanya 24 orang (30,77)

menyatakan cukup baik. Sehingga jika dilihat rataannya (3,55) dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja yang diberikan kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

Hubungan antara profesionalitas, data dan informasi, sarana dan prasarana, koordinasi, dan motivasi terhadap kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 9
Regresi faktor trhadap kinerja LPM

Model Summary ^a								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.740 ^a	.665	.342	3.09117	.365	16.080	1	76
					Sig. F Change			
					.000			

a. Predictors: (Constant), LPM

b. Dependent Variable: Faktor yang Mempengaruhi

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Analisis Hipotesis

Ho : Tidak ada Pengaruh antara faktor-faktor terhadap kinerja LPM

Ha : Ada pengaruh faktor-faktor terhadap kinerja LPM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada kolom signifikan dengan nilai 0.000. untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan melihat signifikansi. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan apabila signifikansi dibawah atau sama dengan 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan tabel pengelolaan SPSS maka diketahui bahwa nilai Sig.F = 0.000 < 0.05 ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. r hitung sebesar 0,740 dan r tabel sebesar 0,227 dan ternyata r hitung lebih besar dari r tabel dengan demikian signifikan dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya nilai R square (koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variable independent terhadap perubahan variable dependent. Artinya ada pengaruh variable independent terhadap dependent R Square sebesar 0.665 yang berarti bahwa 66.5% variable independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja LPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, akurasi data dan informasi, sarana dan prasarana, koordinasi dan motivasi. Adapun skor rata-rata masing-masing faktor yaitu: 1) Profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah 3,34; 2) Sarana dan prasarana dengan skor 3,01; 3) Koordinasi dengan instansi dengan skor 3,11; 4) Akurasi data dan

informasi dengan skor 3,12; dan 5) Motivasi pengurus dengan skor 3,55. Sehingga setelah dianalisis menggunakan regresi linear maka faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan sebesar 66,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristo. 2004. Rejuvinasi Perencanaan dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Buku Pedoman Pola Pembangunan Kemitraan Masyarakat (P2KM) Kota Makassar. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.
- Djaenuri, Aries. 2010. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jakarta: Insist Press.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suzetta, 2007, Perencanaan Pembangunan Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
- Syarifin, Pipin dan Debah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo S.A. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.